



RENCANA STRATEGIS

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN 2020 - 2024



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

TAHUN 2020 - 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2020 – 2024**

No. Publikasi: 71000.2004

Katalog: 1201005.71

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: iv + 66 halaman

Naskah:

BPS Provinsi Sulawesi Utara

Penyunting:

Subbagian Bina Program

Gambar Cover:

Subbagian Bina Program

Ilustrasi Cover:

Subbagian Bina Program

Diterbitkan oleh:

BPS Provinsi Sulawesi Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa seizin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan Rancangan Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 dan kontribusi BPS Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat hal tersebut, maka satuan kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Pelopop Data Statistik Terpercaya Untuk Semua**, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Apabila diperlukan, dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan / revisi muatan dalam Renstra termasuk indikator- indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Visi, Misi, dan Tujuan Renstra BPS Tahun 2020 – 2024.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024 ini disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikirannya. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Manado, 10 Juli 2020

**Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi
Sulawesi Utara**



ATENG HARTONO

DAFTAR ISI

KATALOG	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	16
VISI, MISI, DAN TUJUAN	21
2.1 Visi BPS Provinsi Sulawesi Utara.....	22
2.2 Misi BPS Provinsi Sulawesi Utara.....	22
2.3 Tujuan BPS Provinsi Sulawesi Utara	24
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	33
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	34
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Sulawesi Utara.....	39
3.3 Program dan Kegiatan	52
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	59
4.1 Target Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Utara.....	60
4.2 Kerangka Pendanaan	63
PENUTUP	65
LAMPIRAN	67

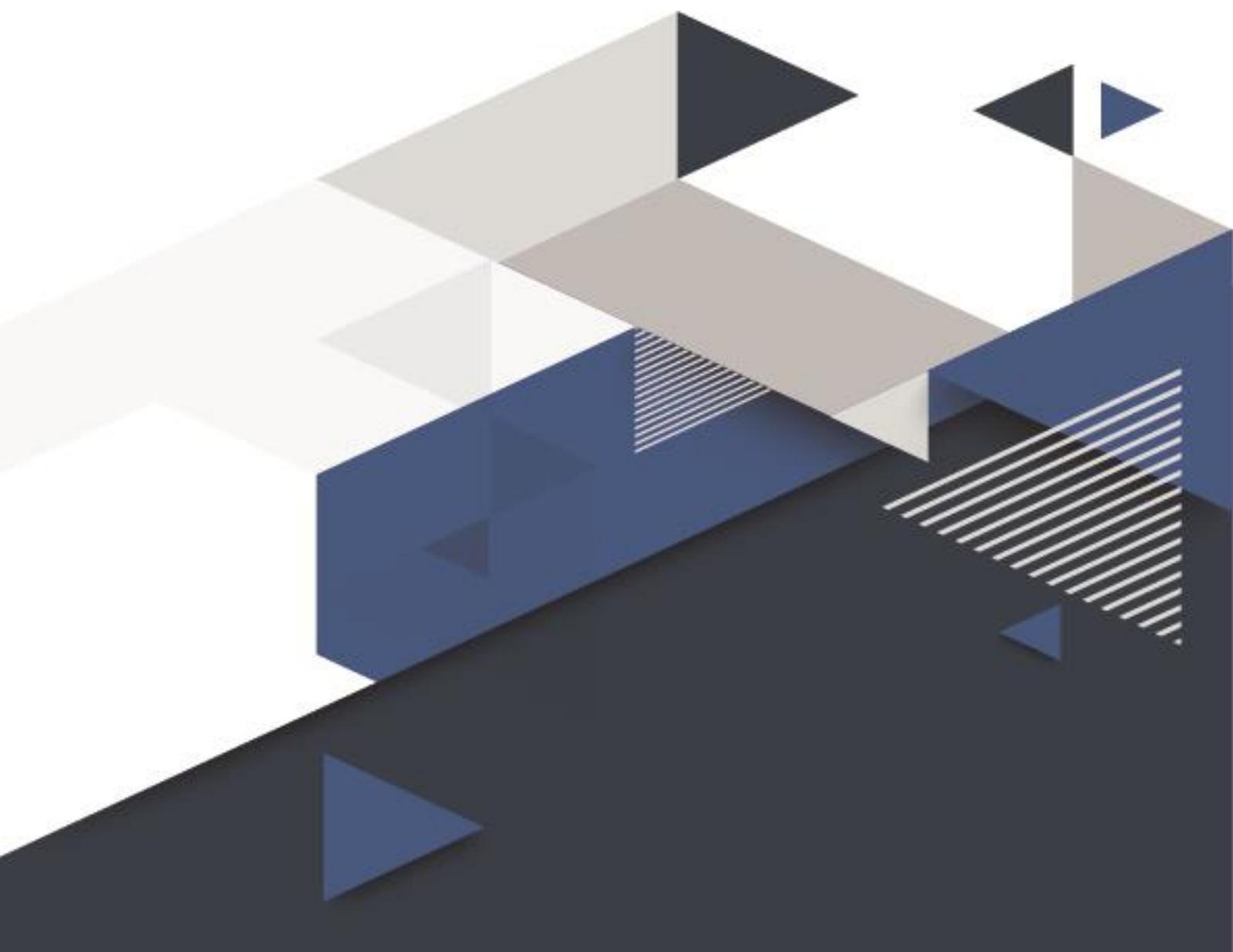
<https://sulut.bps.go.id>

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan



Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Rencana Strategis BPS Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDN berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan visi pembangunan dalam RPJMN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi.

Dalam rangka mendukung RPJMN periode keempat 2020-2024 dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang handal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien.

Selain itu dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan outcome dan output pada level strategis. Hal ini merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan *performance based budgeting*.

1.1 Kondisi Umum

Data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya. Perkembangan kondisi pembangunan lima tahun terakhir banyak menggunakan data BPS. Hal ini sejalan dengan visi yang ditetapkan BPS Provinsi Sulawesi Utara dalam Renstra 2015-2019 yaitu “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 (tiga) pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Provinsi Sulawesi Utara beraspirasi untuk mencapai tujuan strategis pada tahun 2019, yaitu:

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang dilakukan BPS Provinsi Sulawesi Utara dalam periode Renstra 2015-2019, yakni upaya terus menerus untuk meningkatkan : (1) kualitas dari produk yang dihasilkan (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya; (3) efektifitas dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; (4) kualitas dari proses tata kelola (*governance*) didalam organisasinya.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra BPS Provinsi Sulawesi Utara 2015-2019, diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

1.1.1. Pencapaian Umum Visi BPS Provinsi Sulawesi Utara 2015-2019

Disisi ekonomi, pada tahun 2019, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh sebesar 5,66 persen, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang sebesar 6,01 persen. Secara umum, kinerja perekonomian pada akhir periode renstra saat ini lebih lambat jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian pada akhir periode renstra sebelumnya, yaitu tahun 2014, dimana saat itu ekonomi tumbuh sebesar 6,31 persen. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Utara atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2019 mencapai 130,20 triliun rupiah, dengan pendapatan per kapita sebesar 51,94 juta rupiah. Selain itu, Human Development Index (HDI) selalu mencatatkan pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun, terakhir mencapai 72,99 pada tahun 2019 setelah pada tahun sebelumnya mencapai sebesar 72,20. Sementara itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan, dari 7,80 persen pada tahun 2018 menjadi 7,66 persen pada tahun 2019. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, dari 6,09 persen pada Februari 2018 dan 6,86 persen pada Agustus 2018 menjadi 5,37 persen pada Februari 2019. Dari uraian tersebut, dapat dilihat walaupun perekonomian tumbuh melambat selama beberapa tahun terakhir, namun indikator yang lain menunjukkan pergerakan yang positif.

Pencapaian umum visi BPS sebagai pelopor data statistic terpercaya untuk semua, hingga tahun 2019, dapat dilihat dari Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) 2019. Survei ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan kepuasan konsumen guna meningkatkan kualitas data serta pelayanan public. Responden SKD 2019 adalah konsumen yang pernah menerima pelayanan dari Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sulawesi Utara, baik responden yang datang langsung ke PST maupun yang tanpa tatap muka seperti melalui telepon, layanan online, dan lain sebagainya.

Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dilakukan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai amanat dari UU no 16 Tahun 1997, sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS Provinsi Sulawesi Utara juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional

yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara.

BPS sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
2. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal; dan
3. Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS Provinsi Sulawesi Utara untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan lembaga-lembaga internasional. Selama periode Renstra 2015-2019 berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan di antaranya penandatanganan MoU baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain, kunjungan tamu asing, keikutsertaan BPS dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik. Berbagai kesuksesan yang dicapai di periode Renstra 2015-2019 akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam berbagai upaya pencapaian yang ditempuh dalam periode yang baru ini.

Selain upaya mewujudkan SSN, BPS Provinsi Sulawesi Utara juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara selama periode Renstra 2015-2019 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosial-ekonomi yang dihasilkan, antara lain:

1. Data ekonomi hasil Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016 beserta tahapan lanjutannya, data tentang Pariwisata, transportasi, indeks Harga Konsumen, ekspor-impor.
2. Angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.
3. Data pertanian KSA, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan, Data Produksi Perikanan.
4. Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, Industri Besar/Sedang, Nilai Tukar Petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Triwulanan Kegiatan Usaha, dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam hal diseminasi data, untuk kepentingan pengguna data BPS Provinsi Sulawesi Utara menghasilkan sistem yang memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, antara lain : Pelayanan Statistik Terpadu baik di kantor BPS Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Dalam upaya mendukung dan terus menjaga terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta melayani dengan prima dilakukan berbagai strategi peningkatan dan perbaikan

terhadap pelaksanaan kegiatan teknis maupun administrasi. Upaya yang dilakukan BPS Provinsi Sulawesi Utara telah menghasilkan capaian-capaian, diantaranya:

1. Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim Inspektorat dari 69,91 point di tahun 2018 menjadi 73,61 point di tahun 2019. Secara persentase, tahun 2019 mencapai 99,47 persen dari target 74 point, sedangkan di tahun 2018, capaiannya 97,10 persen dari target 72 point.
2. Mendapat penghargaan dari Kepala BPS, DR Suhariyanto, sebagai satuan kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik tahun 2019.
3. Penghargaan kepada Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, DR Ateng Hartono, SE, M.Si atas prestasi meraih 10 terbaik Display Inovasi Proyek Perubahan dalam Penyelenggaraan Pameran Seminar Laboratorium Kepemimpinan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II Angkatan IV dengan judul Proyek Perubahan "SADAP MILENIAL" (Sahabat Data Pembangunan Bagi Milenial) di tahun 2019.
4. Penghargaan Keikutsertaan lomba Inovasi Pemprov Sulawesi Utara untuk inovasi SIPEDAS MANTAP dan SADAP MILENIAL pada tahun 2019.
5. Penghargaan dari Pemprov Sulawesi Utara dalam rangka upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Sulawesi Utara pada tahun 2019.
6. Penghargaan Atas Dukungan Data Indikator Ekonomi Makro dan Sosial Sulawesi Utara serta Sharing Pengetahuan Pada Acara yang Diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Selama Tahun 2019.
7. Penghargaan SIPEDAS Mantap atas keikutsertaan dalam lomba Inovasi Kemenpan RB dan masuk dalam unggulan harapan ketiga di tingkat BPS secara nasional di tahun 2018.
8. Penghargaan SIPEDAS Mantap atas keikutsertaan dalam lomba Inovasi Kemenpan RB di tahun 2016
9. Penghargaan sebagai satuan kerja kategori K/L besar peringkat 2 atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018
10. Penghargaan sebagai satuan kerja kategori K/L besar peringkat 2 atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017
11. Penghargaan sebagai UAPPA-W Terbaik ke-2 dalam laporan keuangan tingkat UAPPA-Wilayah Semester 1 Tahun Anggaran 2016
12. Penghargaan Peringkat III dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga tingkat UAPPA-W Tahun Anggaran 2014
13. Aplikasi SIKAT-Jo (Sistem Informasi Keuangan dan Administrasi Terpadu – Jadwal dan Output), merupakan aplikasi berbasis TI dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang mencakup pengelolaan administrasi dan permintaan pembayaran, dokumentasi laporan, rapat dan kegiatan, visum, Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas, SPJ, KAK, Revisi POK, dan beberapa item penting lainnya yang bertujuan untuk tertib administrasi serta yang terutama juga sebagai alat control Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengelola Anggaran dalam menunjang tugas dan fungsinya sebagai pengelola anggaran.

Disisi lain, kompleksitas SIKAT-Jo yang sangat membantu tugas kinerja PPK dan administrasi menjadi daya tarik tersendiri bagi satker BPS lain sehingga aplikasi ini pun di adopsi oleh 13 satker BPS, link bukti surat permohonan bisa diakses di link <http://s.bps.go.id/SuratPermintaanAplikasiSIKATJO>.

Dalam rangka mempermudah penggunaan, beberapa user SIKAT – Jo dapat mengaksesnya dari Smartphone Android. Sehingga, kapan dan dimana pun, SIKAT – Jo dapat diakses dan kebutuhan proses administrasi tidak tersendat dan terbengkalai.

14. Sistem 7 – 5 – 3

Sistem 7 – 5 – 3 merupakan suatu inovasi non Teknologi Informasi yang tujuan utamanya yaitu untuk mengontrol ketepatan pemasukan hasil survei dan pelaporannya sampai pada penyelesaian dokumen keuangan. 7 hari sebelum batas waktu, BPS Provinsi Sulawesi Utara akan mengirimkan “Warning” ke WA grup masing-masing Eselon IV kabupaten/kota untuk memperingatkan akan batas waktu penyelesaian pekerjaan. 5 hari sebelum batas waktu, Eselon IV BPS Provinsi Sulawesi Utara akan melaporkan ke atasan yakni Kepala Bagian dan Kepala Bidang terkait kondisi penyelesaian pekerjaan terutama yang masih belum selesai. 3 hari sebelum batas waktu, Kepala BPS Provinsi akan langsung memberikan surat kepada kepala BPS Kabupaten/Kota terkait kondisi akhir pelaksanaan pekerjaan untuk segera dipacu dan secepatnya ditindaklanjuti.

15. KENDIS (Kampanye Data Infografis)

Kendis merupakan satu inovasi non Teknologi Informasi berupa infografis untuk Gubernur beserta jajarannya setelah rilis data dilaksanakan. Infografis ini dibuat oleh tim infografis dari BPS Provinsi Sulawesi Utara dan dari BPS kabupaten/kota se Sulawesi Utara.

16. Penilaian Kinerja dan Rewards/Punishments

Penilaian Kinerja dan Rewards/Punishment merupakan inovasi non teknologi informasi yang bermuara pada CKP berbasis kinerja. Hasil penilaian dari CKP menjadi dasar bagi pimpinan untuk memberikan rewards ataupun punishment.

17. Kertas Kerja Dokumen Sumber Data Capaian Kinerja

merupakan satu inovasi non TI yang dibuat dalam rangka memudahkan penelusuran dokumen sumber data capaian kinerja. Seluruh dokumen sumber terjelaskan di kertas kerja tersebut sebagai bukti otentik bahwa setiap nilai yang diisikan pada Form Rencana Aksi untuk setiap kegiatan memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan diandalkan. QITA (Quality Insurance Teknis dan Administrasi)

18. QITA merupakan inovasi berbasis non TI dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan BPS Provinsi ke Kabupaten/Kota baik secara teknis maupun administrasi. Sebagai *feedback* tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan ke BPS Kabupaten/Kota.

Pelayanan utama Badan Pusat Statistik (BPS) adalah menyediakan data statistik untuk berbagai pihak. Data statistik dipakai untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, BPS dituntut untuk menghasilkan data yang berkualitas agar menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

Pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan konsumen (customer-driven) menjadi fokus BPS Provinsi Sulawesi Utara. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu bahwa harus dilaksanakan dengan integritas, berpusat pada masyarakat, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, BPS memerlukan indikator sebagai bahan evaluasi kinerja dalam pemenuhan kebutuhan data statistik masyarakat. Indikator tersebut didapat dari Survei Kebutuhan Data (SKD).

SKD adalah survei yang dirancang dan dilakukan oleh BPS untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen. SKD merupakan survei tahunan yang pertama kali dilaksanakan tahun 2005 dan hanya dilakukan di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (pilot project). Pada tahun 2009 dan 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014 hingga sekarang, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota.

SKD memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan dan menyuarakan kebutuhan data statistik mereka. Hal tersebut merupakan umpan balik bagi BPS untuk meningkatkan kualitas pelayanan statistik. Umpan balik juga memberikan ide baru untuk melakukan inovasi pelayanan publik.

Pelaksanaan SKD 2019 di PST BPS Provinsi Sulawesi Utara dengan target responden sebanyak 100 orang seperti yang diperlihatkan pada tabel 2.1. Realisasi responden melampaui target yaitu sebanyak 103 responden

Tabel Target dan Realisasi Pengguna Data Wilayah PST
BPS Provinsi Sulawesi Utara 2019

Pengguna Data (Jenis Dokumen)	Target	Realisasi			Per- sentase
		Laki-Laki	Perem-puan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengguna Data	100	46	57	103	103

Dari 103 pengguna data yang berkunjung ke PST BPS Provinsi Sulawesi Utara, terdapat 93 pengguna data (90,29 persen) yang memanfaatkan data BPS sebagai rujukan utama. Selebihnya atau sebanyak 10 orang (9,71 persen) tidak memanfaatkan data BPS sebagai rujukan utama. Dengan kata lain, sebagian besar pengguna data menggunakan data BPS sebagai informasi tambahan atau pendukung kegiatan yang dilakukannya.

Berdasarkan jenis kelamin, hanya terdapat perbedaan kecil jumlah pengguna data antara laki-laki dan perempuan. Sebesar 44,66 persen pengguna data adalah laki-laki, dan sebesar 55,34 persen adalah perempuan.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, pengguna data lulusan SLTA sebesar 38,83 persen. Sebagian besar pengguna data lulusan SLTA ini adalah mahasiswa yang memerlukan data BPS untuk keperluan tugas kuliah dan skripsi. Lebih lanjut, pengguna data lulusan perguruan tinggi sebesar 56,31% dengan rincian lulusan D1/D2/D3 sebesar 5,83 persen, lulusan D4/S1 sebesar 35,92 persen dan lulusan S2/S3 sebesar 14,56 persen. Lebih rinci mengenai pengguna data berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel Persentase Pengguna Data Menurut Pendidikan Terakhir Wilayah
PST BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019

Pendidikan Terakhir	Pengguna Data
(1)	(2)
SLTP/Sederajat	4,86
SLTA/Sederajat	38,83
D1/D2/D3	5,83
D4/S1	35,92
S2/S3	14,56
Jumlah	100,00

Berdasarkan pekerjaan utama, pengguna data dikelompokkan menjadi Pelajar/Mahasiswa, Peneliti/Dosen, PNS/TNI/Polri, Pegawai BUMN/D, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan Lainnya. Konsep pekerjaan utama dalam SKD 2019 adalah pekerjaan responden pada saat pencacahan. Segementasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi pemanfaatan data BPS.

Tabel berikut ini menunjukkan persentase pengguna data BPS berdasarkan pekerjaan utama. Hasil SKD menunjukkan bahwa sebanyak 52,43 persen pengguna data adalah mahasiswa/pelajar. Pengguna data yang berprofesi sebagai PNS/TNI/Polri sebanyak 33,98 persen. Pengguna data yang merupakan peneliti/dosen sebesar 7,77 persen. Selebihnya adalah pengguna data yang merupakan pegawai dari BUMN, BUMD, swasta, wiraswasta, dan lainnya.

Tabel Persentase Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama di PST BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019

Pekerjaan Utama (1)	Pengguna Data (4)
Pelajar/ Mahasiswa	52,43
Peneliti/Dosen	7,77
PNS/TNI/Polri	33,98
Pegawai BUMN/D	0
Pegawai Swasta	4,85
Wiraswasta	0
Lainnya	0,97
Jumlah	100,00

Tabel berikut ini menggambarkan persentase pengguna data berdasarkan instansi/institusi tempat pekerjaan utama. Terlihat bahwa 56,31 persen pengguna data berasal dari lembaga pendidikan dan penelitian dalam negeri. Sementara pengguna data yang bekerja pada lembaga pemerintahan pusat dan daerah sebesar 34,95 persen. Pengguna data yang berasal dari Swasta Lainnya sebesar 2,91 persen.

Tabel Persentase Pengguna Data Menurut Instansi/Institusi Tempat Pekerjaan Utama di PST BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019

Instansi/Institusi Tempat Pekerjaan Utama (1)	Pengguna Data (2)
Lembaga Pendidikan & Penelitian Dalam Negeri	56,31
Lembaga Pendidikan & Penelitian Luar Negeri	1,94
Kementerian dan Lembaga Pemerintah	11,65
Lembaga Internasional	0
Media Massa	1,94
Pemerintah Daerah	23,3
Perbankan	0
BUMN/ BUMD	0
Swasta Lainnya	2,91
Lainnya	1,95

Instansi/Institusi Tempat Pekerjaan Utama (1)	Pengguna Data (2)
Jumlah	100,00

Pemanfaatan data atau hasil kunjungan dikelompokkan menjadi tugas sekolah/kuliah, skripsi/tesis/disertasi, penelitian, perencanaan, evaluasi, dan penyebaran informasi. Sebagian besar data dimanfaatkan untuk urusan akademis dan penelitian. Sebesar 54,54 persen dari pengunjung memanfaatkan data untuk Tugas Sekolah/Kuliah, Perencanaan dan Evaluasi; 20,00 persen untuk Skripsi/Thesis/Disertasi, dan 8,18 persen untuk penelitian. Lebih lanjut mengenai gambaran pengguna data menurut pemanfaatan hasil kunjungan digambarkan pada table berikut.

Tabel Persentase Pengguna Data Menurut Pemanfaatan Hasil Kunjungan Utama di PST BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019

Pemanfaatan hasil Kunjungan (1)	Pengguna Data (2)
Tugas Sekolah/kuliah	27,27
Skripsi/Thesis/Disertasi	20,00
Penelitian	8,18
Perencanaan & Evaluasi	27,27
Penyebaran Informasi	17,27
Jumlah	100,00

Gambaran persentase pengguna data berdasarkan jenis layanan terdapat pada tabel berikut ini. Pengguna data yang menggunakan layanan perpustakaan (tercetak dan online) adalah yang paling diminati oleh pengguna data yaitu sebesar 68,96 persen. Layanan lainnya yang banyak digunakan adalah konsultasi statistik statistik sebesar 12,07 persen. Pengguna layanan penjualan data mikro/peta digital/publikasi sebesar 16,38 persen..

Tabel Persentase Pengguna Data Menurut Jenis Layanan yang Digunakan di PST BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019

Jenis Layanan yang Digunakan (1)	Persentase Pengguna Data (2)
Perpustakaan Tercetak	8,62
Perpustakaan Digital	60,34
Penjualan Data Mikro/Peta digital/ Publikasi	16,38
Konsultasi Data Statistik	12,07
Konsultasi Kegiatan & Rekomendasi Statistik	0
Penjualan Buku	2,59
Jumlah	100,00

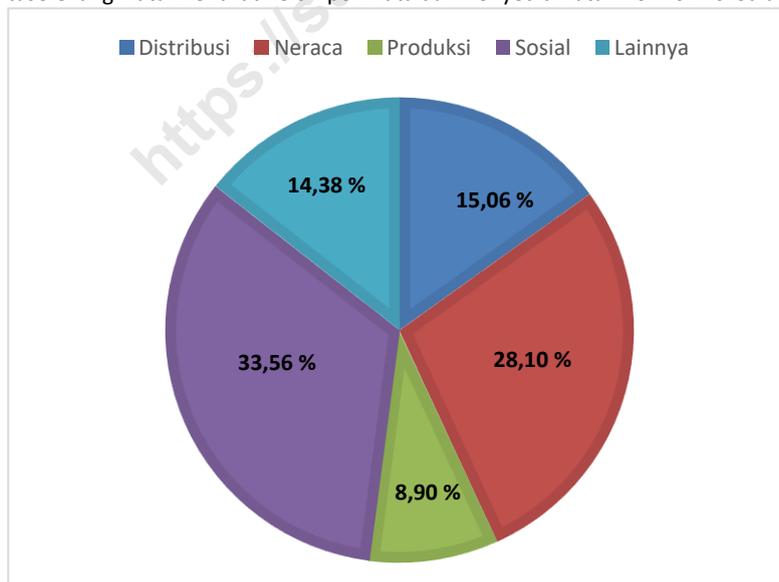
Jumlah pencarian data Sulawesi Utara sebanyak adalah 146 orang-data. Data yang paling banyak dicari adalah data PDRB Menurut Lapangan Usaha sebesar 17,12 persen. Tabel 3.1 memberikan gambaran tentang 10 (sepuluh) teratas data yang paling banyak dicari menurut jenis data.

Tabel Sepuluh Jenis Data tentang Provinsi Sulawesi Utara yang Paling Banyak Dicari, 2019

Jenis Data	Persentase dari Total Orang-Data
(1)	(2)
1. PDRB Menurut Lapangan Usaha	17,12
2. Kependudukan	15,75
3. Keuangan Pemerintah	9,59
4. Ketenagakerjaan	8,90
5. Pariwisata & Jasa-jasa	8,22
6. Kemiskinan	5,48
7. Tanaman Perkebunan	2,74
8. Industri Besar & Sedang	2,74
9. Harga Konsumen	2,74
10. Keadaan Geografi	2,74

Dari jumlah tersebut, 33,56 persen merupakan pencarian data pada ragam data sosial. Selanjutnya, 28,10 persen merupakan pencarian data pada ragam data Neraca. Kemudian ragam data distribusi, Lainnya, Produksi berturut-turut sebesar 15,06; 14,38; dan 8,90 persen.

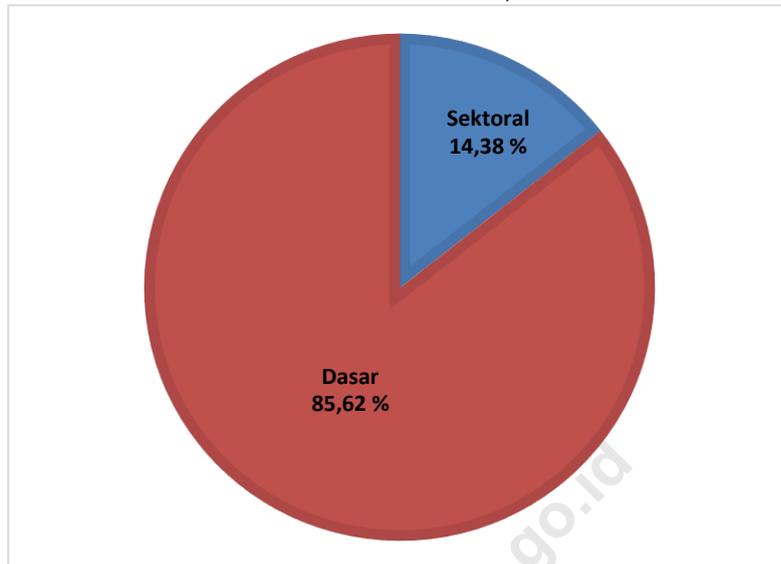
Gambar Persentase Orang-Data Menurut Kelompok Data dari Penyedia Data BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019



Data statistik yang dicari oleh masyarakat juga dapat dibedakan menjadi statistik statistik dasar dan sektoral. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

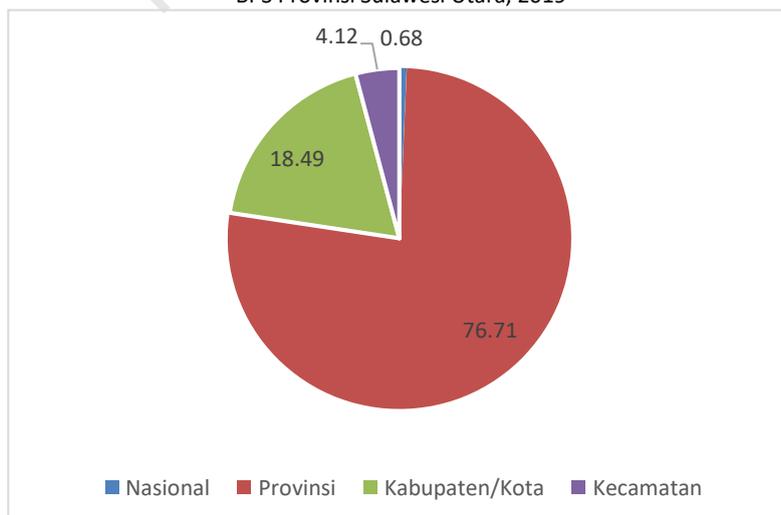
Berdasarkan hal tersebut, data statistik dasar adalah data yang paling banyak dicari yaitu sebesar 85,62 persen. Selebihnya atau sebesar 14,38 persen data yang dicari adalah data statistik sektoral.

Gambar Persentase Orang-Data Menurut Jenis Statistik dari Penyedia Data
BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019



Berdasarkan level data, pengguna data mencari data yang lebih rinci seperti pada tingkat penyajian kabupaten/kota hingga kecamatan. Sebesar 76,71 persen pengguna data mencari data pada tingkat provinsi; 18,49 persen pada tingkat Kabupaten/Kota; 4,11 persen pada tingkat kecamatan dan 0,68 persen pada nasional. Lebih rinci mengenai level data yang dicari pengguna ditunjukkan pada gambar 3.3, sedangkan level data per kelompok data disajikan pada tabel 3.2.

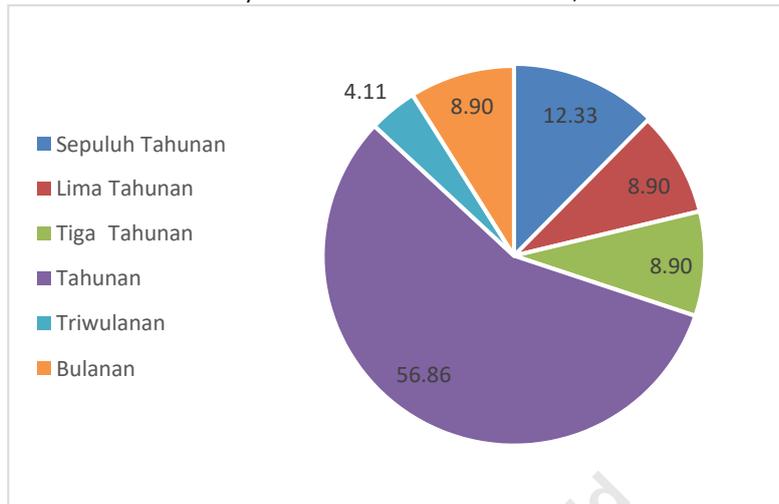
Gambar Persentase Orang-Data Menurut Level Data dari Penyedia Data
BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019



Periode data dalam SKD 2019 terbagi menjadi sepuluh tahunan, lima tahunan, tiga tahunan, tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, mingguan, harian, dan lainnya. Data periode tahunan merupakan data yang paling banyak dicari yaitu sebesar 56,85 persen. Saat ini, sebagian besar data BPS tersedia dengan periode tahunan. Data dengan periode triwulanan dan bulanan hanya dapat disajikan

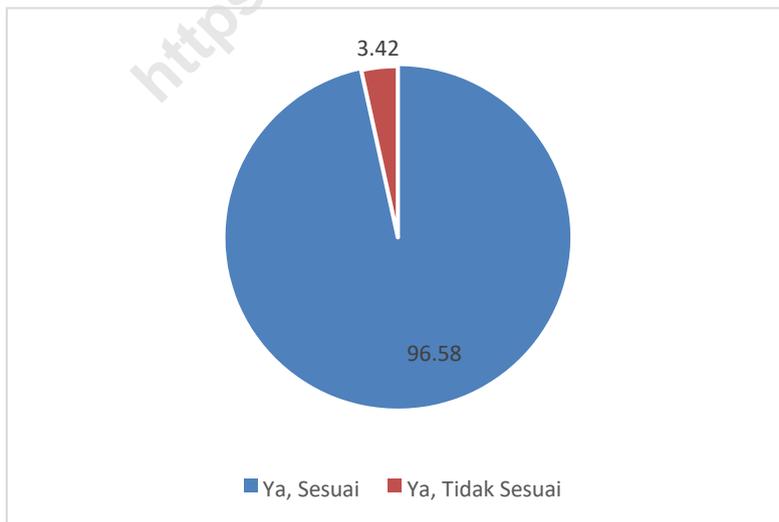
pada level provinsi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara data mingguan dan harian belum dapat disediakan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar Persentase Orang-Data Menurut Periode Data dari Penyedia BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019



Hasil SKD menghasilkan persentase perolehan data apakah data yang yang dicari dapat diperoleh atau tidak oleh pengguna data. Data yang diperoleh tersebut juga dapat dibedakan dengan kesesuaiannya. Data yang sesuai adalah jenis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Data yang diperoleh namun tidak sesuai adalah jenis data yang diperoleh tetapi kurang sesuai dengan kebutuhan. Ketidaksesuaian data yang diperoleh dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian jenis, wilayah, tahun, level, atau periode data antara yang diperoleh dengan yang dicari pengguna data.

Gambar Persentase Orang-Data Menurut Perolehan Data yang dihasilkan BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019



Sebesar 96,58 persen data dapat diperoleh dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu, sebanyak 3,42 persen pengguna data menggunakan data pengganti.

Gap Analysis Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan BPS

Tabel Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan *Gap* Pelayanan di PST BPS Provinsi Sulawesi Utara Menurut Atribut Pelayanan, 2019

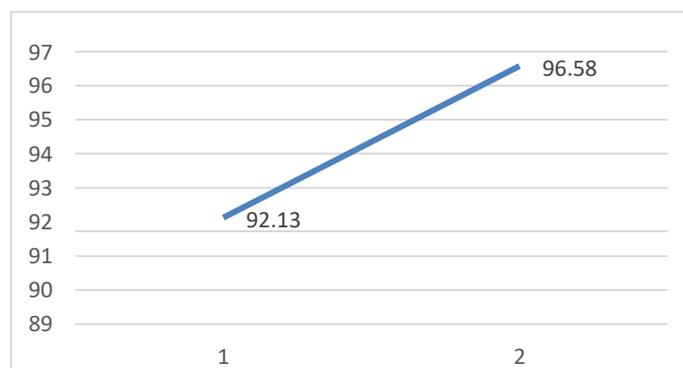
Atribut Pelayanan	Kepentingan	Kepuasan	Gap
Kejelasan informasi dan prosedur pelayanan	9,60	9,59	0,01
Kejelasan persyaratan pelayanan	9,61	9,61	0,00
Sikap petugas	9,76	9,75	0,01
Kemampuan Petugas	9,69	9,70	- 0,01
Kejelasan waktu pelayanan	9,68	9,66	0,02
Kejelasan jangka waktu pelayanan	9,62	9,64	-0,02
Kejelasan biaya pelayanan	9,60	9,63	-0,03
Kenyamanan sarana dan prasarana	9,66	9,70	-0,04
Kemudahan memperoleh publikasi di BPS	9,68	9,70	-0,02
Kemudahan memperoleh data dari website BPS	9,67	9,69	-0,02
Kemudahan akses metadata	9,66	9,72	-0,06
Kejelasan fasilitas pengaduan	9,66	9,70	-0,04

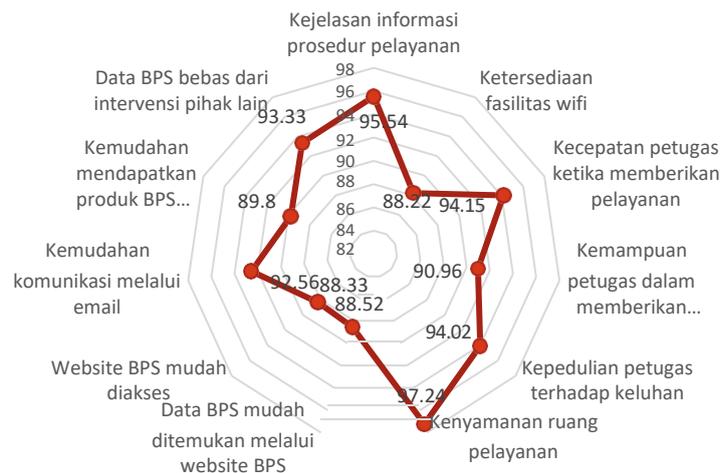
Tabel diatas yang menampilkan nilai tingkat kepentingan, tingkat kepuasan menurut atribut pelayanan, dan gap di antara keduanya. Analisis *gap* merupakan potret tingkat kepentingan pengguna dibandingkan dengan tingkat kepuasan pengguna layanan. Secara keseluruhan tingkat kepuasan pengguna layanan berada di antara skala 3 dan 4 tetapi memiliki nilai di bawah tingkat kepentingan pengguna layanan. *Gap* terbesar terdapat pada atribut kemudahan akses metadata (0,06), sedangkan gap terendah terdapat pada kejelasan persyaratan pelayanan (0,00).

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)/Customer Satisfaction Index (CSI) digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPS. Nilai IKK untuk PST BPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 sebesar 96,58, yang artinya kualitas pelayanan PST BPS provinsi Sulawesi Utara masuk kategori baik.

Berdasarkan gambar 5.4, IKK BPS di PST BPS provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan 4,45 dari 92,13 pada tahun 2018 menjadi 96,58 pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen di PST BPS provinsi Sulawesi Utara semakin puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PST BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Pelayanan BPS Provinsi Sulawesi Utara





Melalui SKD, BPS memperoleh segmentasi pengguna data BPS. Menurut karakteristik pengguna data, mayoritas pengguna data adalah kalangan pelajar/mahasiswa yang menggunakan data BPS untuk keperluan tugas sekolah/kuliah maupun menyusun tugas akhirnya. Sementara menurut jenis layanan, perpustakaan tercetak adalah yang paling diminati oleh pengguna data. Oleh karena itu, kenyamanan PST dan pencetakan publikasi pada hari rilis menjadi perhatian utama sebagai bentuk pelayanan prima BPS Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, fasilitas *wifi* akan diperbaiki sehingga pengunjung semakin betah berada di PST.

Pengguna data yang memperoleh data sesuai kebutuhannya mencapai 83,68 persen. Terdapat 11,57 persen pengguna data yang tidak memperoleh data yang dihasilkan oleh sesuai kebutuhannya. Data yang tidak diperoleh disebabkan oleh tidak tersedia data pengganti sebagai pendekatan/proksi dari data yang dibutuhkan. Data-data tersebut adalah data-data yang bukan tugas dan kewenangan BPS Provinsi Sulawesi Utara untuk disediakan.

Secara umum pelayanan data di BPS Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sebesar 96,58 persen, naik 4,45 poin dari tahun 2018. Walaupun demikian, masih terdapat aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan yaitu kelengkapan koleksi publikasi pada *digital library*, kemudahan memperoleh

1.1.2. Capaian Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Utara 2015-2019

Capaian kinerja BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 – 2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama periode Renstra BPS Provinsi Sulawesi Utara 2015 – 2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja BPS Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2015 – 2019 tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel Capaian Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Utara Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis
Tahun 2015 – 2019 (%)

Tujuan / Sasaran Strategis	Capaian (%) 2015	Capaian (%) 2016	Capaian (%) 2017	Capaian (%) 2018	Capaian (%) 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Peningkatan kualitas data statistik	105,75	121,25	102,67	108,33	108,69
1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	105,75	121,25	102,67	108,33	108,69
2. Peningkatan pelayanan prima hasilkegiatan statistik	114,63	125	98,99	110,84	105,26
2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	114,63	125	147,72	183,93	115,52
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	83,33	83,33	183,33	200	120
3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN	83,33	83,33	183,33	200	120
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	160	100	100	97,09	99,47
4.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN	160	100	100	97,09	99,47
4.2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BPS	100	75	100	95	100

Dilihat dari perkembangannya selama lima tahun terakhir sejak 2015, capaian kinerja tujuan hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2016 yang sempat mengalami sedikit penurunan di sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BS, serta penurunan di tahun 2018 juga di sasaran yang sama. Meskipun demikian, peningkatan capaian tersebut segera diperbaiki dengan pencapaian yang baik di tahun 2019 sebagai akhir dari periode. Capaian tujuan di tahun 2019 merupakan yang tertinggi sejak lima tahun terakhir.

Dari tahun ke tahun, nilai capaian semakin baik. Hal ini mengindikasikan bahwa BPS Provinsi Sulawesi Utara terus berbenah diri, memperbaiki dan melengkapi setiap kekurangan. Berbagai kendala dan permasalahan yang pernah dihadapi sepanjang kurun waktu 2015 – 2019 ini menjadi landasan pemikiran dan patokan serta pembelajaran untuk melangkah lebih mantap lagi di kurun waktu 2020 – 2024. Kekurangan dan kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya hendaknya tidak terulang lagi.

Salah satu target utama dari reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Pada tujuan keempat, “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” diukur berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK BPS tersebut. Setelah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian terhadap akuntabilitas keuangan tahun 2014, BPS sempat mengalami penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2016 atas penilaian terhadap akuntabilitas keuangan tahun 2015. Namun kondisi tersebut

segera ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan sehingga di tahun berikutnya BPS mampu mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga akhir tahun renstra 2019. Hal ini menunjukkan bahwa BPS mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tiga tahun sebelumnya.

1.2 Potensi dan Permasalahan

BPS Provinsi Sulawesi Utara merupakan satuan kerja eselon 2 di level provinsi dan memiliki 12 satuan kerja level kabupaten kota dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga terdapat 3 satuan kerja level kabupaten kota yang membawahi 2 kabupaten kota. Dengan keadaan berbagai ragam yang ada di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara, terdapat potensi dan permasalahan yang beragam juga. Hal ini diselesaikan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh satuan kerja masing-masing.

1.1.3. Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain :

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Potensi BPS diharapkan dapat menjadi *booster* transformasi di BPS dari sisi kualitas data, kelembagaan dan SDM, serta sistem dan infrastruktur tercakup secara keseluruhan dalam program STATCAP CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics*).

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (*National Statistics Office/NSO*) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan *mobile applications* akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan *mobile applications* akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun. Dengan penggunaan *mobile applications* ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses. Teknologi *cloud computing* juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu *data warehouse*.

Sustainable Development Goals (SDG's), menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Sulawesi Utara. BPS Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran yang krusial di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture, food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Jelaslah, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.

Dari keadaan yang sudah dilakukan, dipetakan beberapa potensi yang dimiliki BPS Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan Renstra BPS Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:

1. Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS yang diidentifikasi melalui kegiatan survei kebutuhan data tiap tahunnya. Hal ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, karena kepuasan konsumen merupakan indikator utama dalam mengukur capaian kinerja BPS untuk menghasilkan dan menyediakan data statistik yang berkualitas.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola data bagi instansi pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta sebagai bentuk dukungan peraturan perundang-undangan yang menunjang Sistem Statistik Nasional. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai Pembina data statistik. Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa BPS dibentuk untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, BPS bertugas sebagai Pembina statistik

untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional, yang dilakukan kepada seluruh penyelenggara kegiatan statistik di Indonesia. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, terlihat bahwa BPS memiliki posisi yang tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

3. BPS merupakan lembaga yang sistem dan infrastruktur terkait teknologi dan informasi yang berkembang cukup pesat. Sensus Penduduk yang merupakan kegiatan skala nasional dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan dari sisi teknologi dan informasi dimana terkini Sensus Penduduk 2020 menerapkan pemanfaatan *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* dan *Copmputer Aided Web Interviewing (CAWI)* dalam pendataannya. Selain Sensus Penduduk 2020, sudah ada beberapa survei yang dalam pelaksanaannya menggunakan metode ini dan terhubung secara online, sebut saja pendataan PODES, Pemetaan, Survei Perilaku Anti Korupsi dan lainnya.
4. Meningkatnya kebutuhan akan narasumber terkait *sharing* data sosial ekonomi di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Utara menunjukkan posisi BPS Provinsi Sulawesi termasuk strategis dalam menentukan kebijakan di daerah.
5. Hubungan kerjasama yang baik dan aktif di kalangan wartawan yang berpotensi membuat BPS Provinsi Sulawesi Utara semakin dikenal masyarakat. Hal ini akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Utara yang semakin efektif dan efisien.

1.1.4. Permasalahan

BPS Sulawesi Utara telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2020 – 2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Sulawesi Utara harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Sulawesi Utara sebagai pelopor data terpercaya dan penyedia data statistik yang berkualitas bagi semua dari sudut pandang responden maupun masyarakat umum sebagai pengguna data dapat terus meningkat. Permasalahan yang muncul di BPS Provinsi Sulawesi Utara antara lain:

1. Peningkatan kebutuhan pengguna data terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data. Strategi komunikasi ini dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik secara akurat kepada setiap pengguna data.
2. *Respondent burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Provinsi Sulawesi Utara adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Provinsi Sulawesi Utara dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

3. *Respon Rate* atau persentase pemasukan dokumen suatu survey di BPS Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi permasalahan yang harus diprioritaskan karena pengaruhnya besar terhadap tujuan dan sasaran BPS kedepan. Masalah perijinan/birokrasi, geografis, dan sumber daya yang terbatas menjadi masalah utama dalam meningkatkan *respon rate* ini.
4. Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data dan kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan daerah pemekaran.
5. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.
6. Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.
7. Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.
8. BPS Provinsi Sulawesi Utara memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk perbaikan dan kemajuan serta penyesuaian dengan kemajuan teknologi agar setiap kebutuhan dan permintaan masyarakat dapat dipenuhi, dan setiap tantangan dan permasalahan yang ada dapat ditanggulangi.
9. Disisi lain, pemanfaatan Sumber Data Baru (di antaranya adalah *Big Data* dan *Data Administrative*) yang telah berkembang dewasa ini, belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS. Pentingnya *Big Data* tidak hanya melihat seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi juga apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut. Efek dalam pemanfaatan sumber data baru mungkin dapat menjadi jawaban yang memungkinkan, antara lain :
 - 1) Pengurangan biaya,
 - 2) Pengurangan waktu,
 - 3) Pengembangan output, dan penawaran yang dioptimalkan,
 - 4) Pengambilan keputusan yang cepat.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS Provinsi Sulawesi Utara faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Setiap upaya dilaksanakan demi menghasilkan data akurat. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS Provinsi Sulawesi Utara telah teridentifikasi, dan berusaha di tanggulangi dengan upaya antara lain berbagai pelatihan/briefing untuk setiap kegiatan, *capacity building*, dan *sharing knowledge* yang

dikemas dengan berbagai metode serta konten yang menarik dan lain sebagainya. Sangat dianjurkan juga agar setiap pegawai dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai. Berbagai hal yang telah ditempuh ini bertujuan untuk menjawab, melengkapi, dan menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan terkait SDM antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Provinsi Sulawesi Utara saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (*vacant*) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS Provinsi Sulawesi Utara masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang tepat untuk dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor eksternal dan internal sehingga bisa dilakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk peningkatan dan perbaikan kedepan yang disusun sebagai berikut:

Faktor Internal

1) Kekuatan/*Strengths*

- a) Tersedianya dan meratanya SDM yang berkualitas sampai level kabupaten kota
- b) Tersedianya infrastruktur/sarana prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memadai
- c) Tersedianya data BPS dalam format elektronik
- d) Penyajian data BPS sebagai output yang menarik dan terupdate

2) Kelemahan/*Weaknesses*

- a) Proses bisnis statistik yang berjalan secara autopilot dan belum terintegrasi
- b) Penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal
- c) Keterbatasan diseminasi
- d) Keterbatasan sumber daya (anggaran, SDM, Infrastruktur) yang tersedia

Faktor Eksternal

1) Peluang/*Opportunities*

- a) BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai lembaga strategis penyedia data statistik untuk pembangunan (rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan)
- b) *Big Data* dan data administrative yang sangat banyak dan beragam
- c) Permintaan cakupan estimasi dengan area terkecil
- d) Kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional
- e) BPS Provinsi Sulawesi Utara dipercaya sebagai sumber data statistik untuk kebijakan pemerintah
- f) Tingginya permintaan data kekinian untuk mendukung kebijakan strategis
- g) Adanya lembaga survei lain yang banyak berkembang di Indonesia sesuai dengan kebutuhan stakeholder tertentu

2) Ancaman/*Threats*

- a) Produk statistik tidak dimanfaatkan oleh pengguna data
- b) Keraguan masyarakat terhadap kredibilitas BPS sebagai penghasil data yang berkualitas
- c) Tinggi resistensi responden terutama di kota besar (penolakan responden) yang berpengaruh terhadap *respon rate*
- d) Tingginya *responden burden* (beban responden)

BAB 2

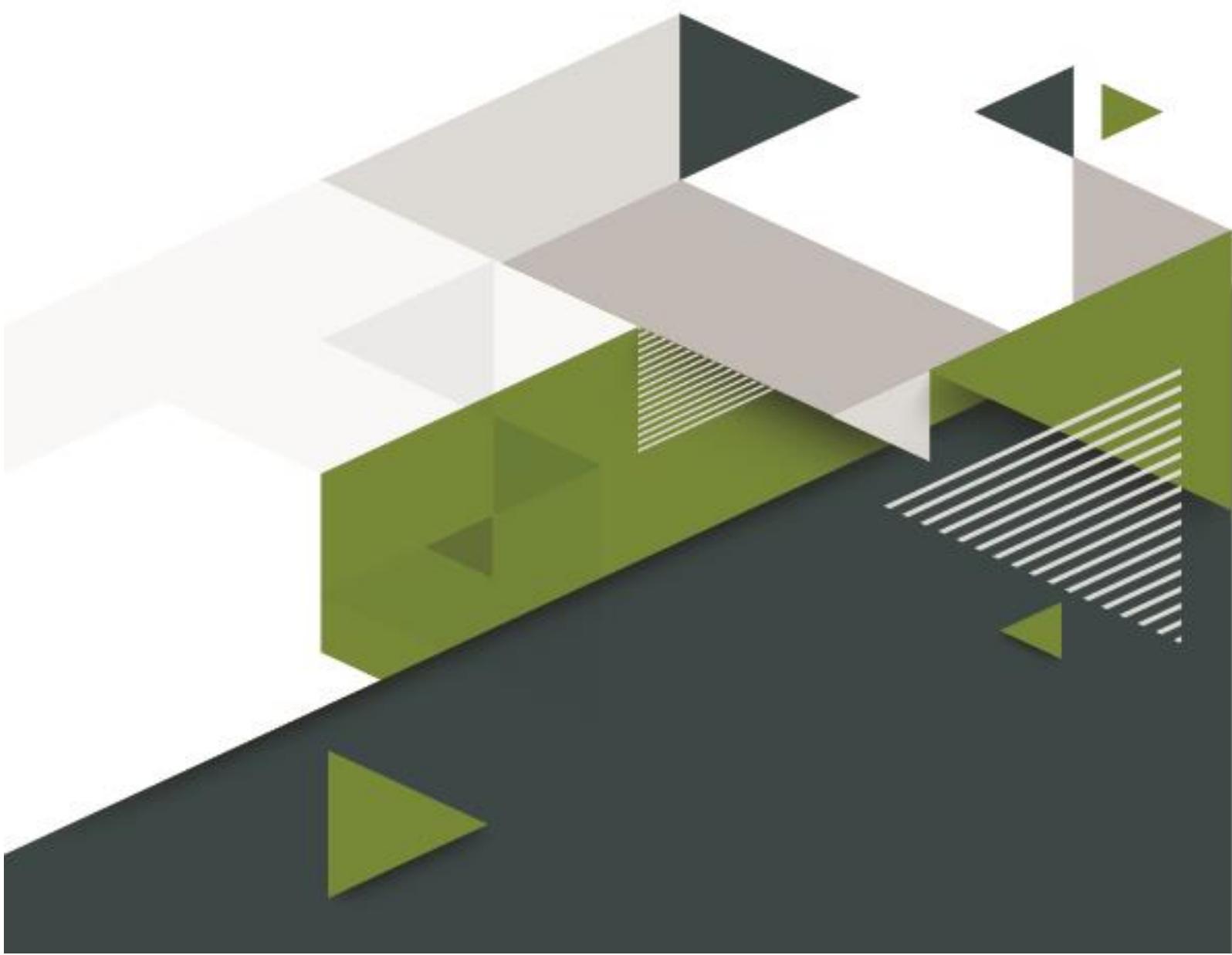
Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

2.1 Visi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

2.2 Misi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara



2.1 Visi BPS Provinsi Sulawesi Utara

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020– 2024, melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif BPS menetapkan visi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam menghasilkan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi BPS 2020-2024, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai Pembina data statistik.

2.2 Misi BPS Provinsi Sulawesi Utara

Misi BPS Provinsi Sulawesi Utara dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang ke 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut.

1. *Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional*

2. *Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan*

3. *Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional*

4. *Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.*

Uraian penjelasan dalam Misi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah, maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas).

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997). BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik

bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesionalisme ...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.”

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3 Tujuan BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi.

Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk memajukan kesejahteraan

rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan berikut ini.

Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Provinsi Sulawesi Utara 2020 - 2024

		MISI BPS PROVINSI SULAWESI UTARA	
		2020 -2024	
VISI BPS PROVINSI SULAWESI UTARA	2020 - 2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
			2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional			
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah			
TUJUAN			1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatnya kolaborasi, inetgrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Rumusan tujuan BPS Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Tahun 2020-2024 adalah :

1. Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan :
 - Misi ke-1 : Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan inernasional;
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan :
 - Misi ke-2 : Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;

3. Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan :

Misi ke-3 : Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistic untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan

4. Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan :

Misi ke-4 : Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrase, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS : sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistic yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistic di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menyediakan data dimanfaatkan	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	28	96	96	97	97

2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	25	50	50	50	50
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Penilaian SAKIP	74	74	75	75	75

2.4 Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Utara

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan *eksternal*) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan *internal*).

Renstra BPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, yang artinya seluruh Program KL harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Provinsi Sulawesi Utara ini termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan Presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan outcome dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kemnetrian/Lembaga, maupun antar Kementrian / Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS yang terdiri dari : (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customers, perspektif internal process, dan perspektif learning and growth. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaiin sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan logic model framework dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel berikut ini.

T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1.	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS2.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS3.	Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS4.	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
	SS5.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif Stakeholder

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - ii. Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - ii. Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - iii. Sosialisasi kepada masyarakat
 - iv. Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.
 - v. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - vi. Membuat *customer relationship management*
 - vii. Menyusun *data mining* pengguna data
 - viii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - viii. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - ix. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - x. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator :

- i. Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
 - ii. Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - iv. Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
 - v. Dokumen *grand design smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
- i. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - ii. Jumlah *technical assistance* yang dilakukan BPS di NSO
 - iii. Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - iv. Jumlah NSO yang menerima *statistical capacity building* di BPS
 - v. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
- i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
 - ii. indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas
2. Perspektif Stakeholder
- SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
- Dengan indikator sasaran:
- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
 - b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I
- Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK
3. Perspektif Internal Process
- SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
- Dengan indikator sasaran:
- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
 - b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif Learning and Growth

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Opini BPK atas laporan keuangan BPS
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS



Gambar Peta Strategi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara 2020 - 2024

Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

- ☑ Profesionalisme (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik);
- ☑ Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel);
- ☑ Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
- b. Efektif
memberikan hasil maksimal.
- c. Efisien
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.
- d. Inovatif
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus.
- e. Sistemik
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi.
- b. Disiplin
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Konsisten
selarasnya kata dengan perbuatan.
- d. Terbuka
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.
- e. Akuntabel
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terpercaya
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.
- b. Jujur
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas.
- c. Tulus

melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.

d. Adil

menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

<https://sulut.bps.go.id>

BAB 3

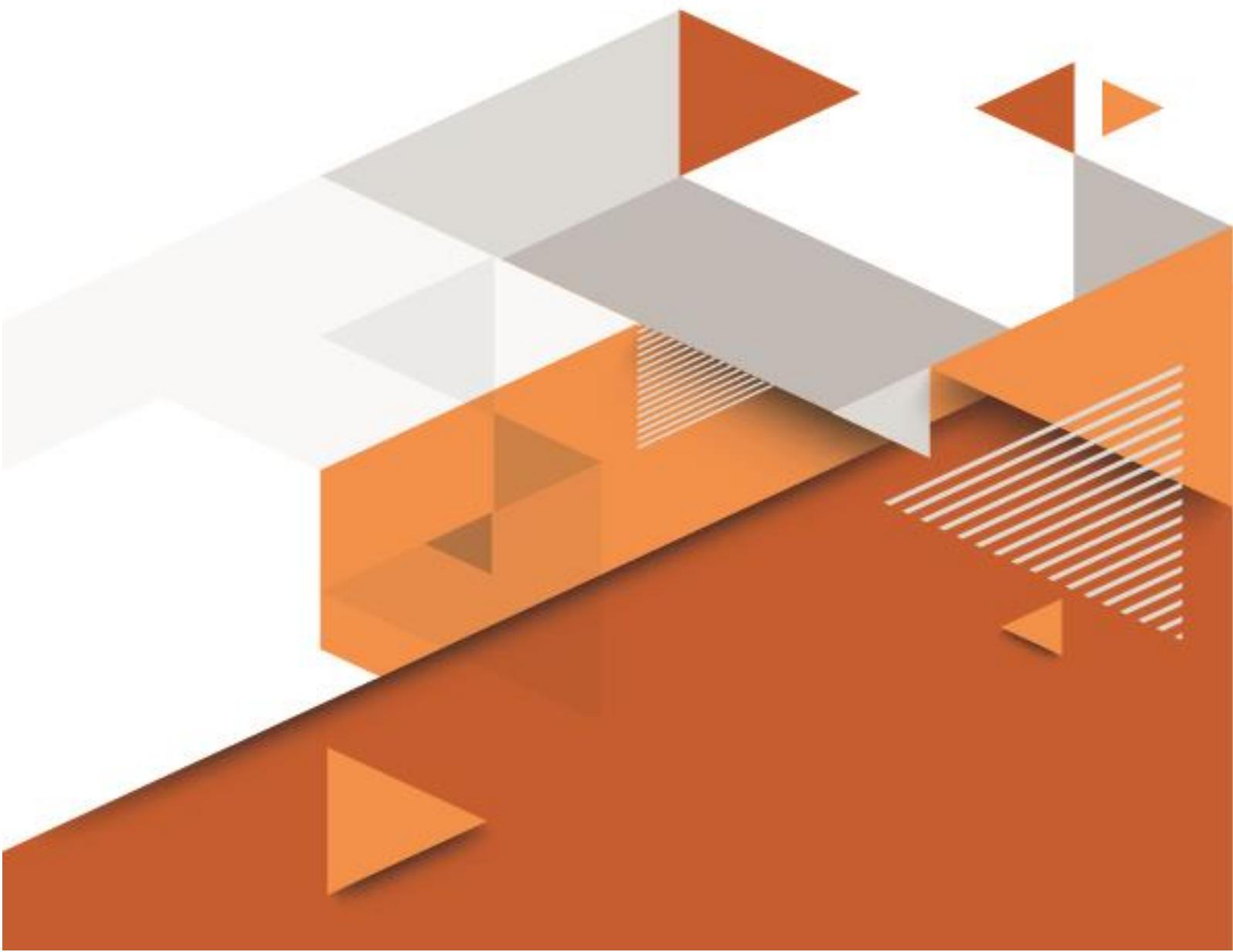
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik

3.3 Kerangka Regulasi

3.4 Kerangka Kelembagaan



3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden:

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong”***

Presiden dan Wakil Presiden menetapkan strategi dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Nawacita sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Layanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. Produktivitas
 - c. Pembangunan karakter
2. Pembangunan Infrastruktur, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Infrastruktur pelayanan dasar
 - b. Infrastruktur ekonomi
 - c. Infrastruktur perkotaan
 - d. Energi dan ketenagalistrikan
 - e. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital
3. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Pendekatan Omnibus Law, dengan strategi penggabungan beberapa ketentuan undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya
 - b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun
4. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Penyederhaan prosedur
 - b. Penyelenggaraan E-Government
 - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Industrialisasi
 - b. Pengembangan destinasi unggulan
 - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Sasaran makro pembangunan 2020-2024, antara lain:

1. Pertumbuhan investasi pada kurun waktu 2020 – 2024 sebesar 6,6 – 7 persen;
2. Share industri pengolahan sebesar 21,0 persen pada tahun 2024;
3. Defisit transaksi berjalan sebesar 1,7 persen PDB pada tahun 2024;
4. Tingkat inflasi sebesar 2,7 persen pada tahun 2024;

5. Pertumbuhan ekspor non migas sebesar 7,4 persen pada kurun waktu 2020 – 2024;
6. Pertumbuhan industri pengolahan non migas 6,6 – 7 persen pada kurun waktu 2020 – 2024; dan
7. Rasio pajak 10,7 – 12,3 persen PDB tahun 2024.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan pada tahun 2024, antara lain:

1. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen;
2. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374;
3. IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54; dan
4. Tingkat kemiskinan 6,0 – 7,0 persen pada tahun 2024.

Dalam Dokumen RKP 2020, sebelum RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan yang termasuk dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2020 adalah:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan Program Prioritas :
 - a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
 - b) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
 - c) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi.
 - d) Pengentasan kemiskinan.
 - e) Revolusi mental, pembangunan kebudayaan, dan prestasi bangsa.
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan Program Prioritas :
 - a) Perluasan infrastruktur dasar.
 - b) Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
 - c) Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - d) Peningkatan infrastruktur perkotaan.
 - e) Transformasi digital.
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, dengan Program Prioritas :
 - a) Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
 - b) Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.
 - c) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
 - d) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 - e) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan Program Prioritas:
 - a) Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.
 - b) Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air.
 - c) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

- d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
 - e) Penguatan ketahanan bencana.
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dengan Program Prioritas :
- a) Penguatan kemampuan pertahanan.
 - b) Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional.
 - c) Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
 - d) Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
 - e) Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas.

Selain major project yang ada dalam Lampiran RPJMN, beberapa kegiatan baik prioritas bidang maupun prioritas lembaga yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPS semuanya yang mendukung agenda pembangunan sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan mendukung Prioritas Nasional sebelum RPJMN 2020-2024 ditetapkan di antaranya:

Prioritas Nasional yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020
Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan melalui, Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.
2. Penyusunan Interregional Input-Output (IRIO) serta Komponen Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Data Desa (Podes Mini)
Komponen ini mendukung PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, Program Prioritas yang akan diwujudkan adalah Transformasi Digital dengan Kegiatan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital dan Proyek Prioritas Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi.
3. Passenger Exit Survey (PES), Penyusunan Tourism Satellite Accounts (TSA), dan Pendataan Wisatawan Nusantara dan Pengembangan Data Statistik E-Commerce
Komponen ini mendukung PN 3. Nilai Tambah Ekonomi Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, melalui proyek prioritas Pengembangan Statistik Pariwisata dan Pengembangan E-Commerce. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai adalah Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
4. Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Komponen ini mendukung PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, melalui Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan. Program ini diturunkan dalam Kegiatan Prioritas Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, dan dalam Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian.

Prioritas Nasional yang Tidak Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS

Prioritas Nasional yang tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi BPS, baik yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dan RKP Tahun 2020, adalah Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Meskipun secara langsung tidak terkait, namun BPS memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian PN tersebut. Komitmen tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama pelaksanaan kegiatan terkait PN tersebut dengan K/L terkait, atau dengan pembinaan yang diberikan BPS kepada K/L terkait untuk melakukan pengumpulan datanya. Komponen rutin yang diselenggarakan BPS terkait isu pertahanan dan keamanan adalah:

1. Penyusunan Statistik Politik Keamanan, dengan tujuan sebagai berikut:
 - a) Menghimpun data statistik politik dan keamanan.
 - b) Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu.
 - c) Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.
2. Survei Perilaku Anti Korupsi, yang bertujuan untuk:
 - a) Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia.
 - b) Mengukur sejauh mana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Stranas PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi.
3. Survei Demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk:
 - a) Mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia.
 - b) Mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
 - c) Memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

3.1.1 Agenda Prioritas

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-4 periode 2020-2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.



Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025

(Sumber: Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80)

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain:

1. Nawacita kesatu - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dukungan BPS untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan.
2. Nawacita kedua – Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk maksud tersebut, BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program *Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics* (Statcap Cerdas) sejak tahun 2008.

3. Nawacita ketiga – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. BPS mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.
4. Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BPS menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), penerapan zona integritas.
5. Nawacita kelima – Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
6. Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri, ekspor-impor, dan lain sebagainya.
7. Nawacita ketujuh – Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain sebagainya.
8. Nawacita kedelapan – Melakukan revolusi karakter bangsa, BPS mendukung agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat).
9. Nawacita kesembilan – Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, BPS mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data ketahanan sosial, seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi Indonesia, dan lain sebagainya.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Sulawesi Utara

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
 - ii. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a) Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
 - b) Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan

- c) Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral. Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
 - ii. Memperbaiki metode pengumpulan data;
 - iii. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
 - iv. Membuat customer relationship management;
 - v. Menyusun data mining pengguna data;
 - vi. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
 - vii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
 - c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.
 - i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
 - ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
 - b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.
- Strategi yang dilakukan:
- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
 - ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
 - iv. Meningkatkan penerapan smart office pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
 - v. Menyusun dokumen grand design smart office berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;
- Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:
- i. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik dan
 - ii. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas
- Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (United Nation Statistics Devision) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (principle quality) berdasarkan 10 UN Fundamental Principle of Official Statistics. Strategi yang dilakukan:
- i. Menyusun quality gates dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik
 - ii. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas BPS, yaitu:

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (timeliness), mudah diakses (accessibility), konsisten (koheren), mudah diinterpretasi (interpretability) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (evidence-based policy).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020 - 2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

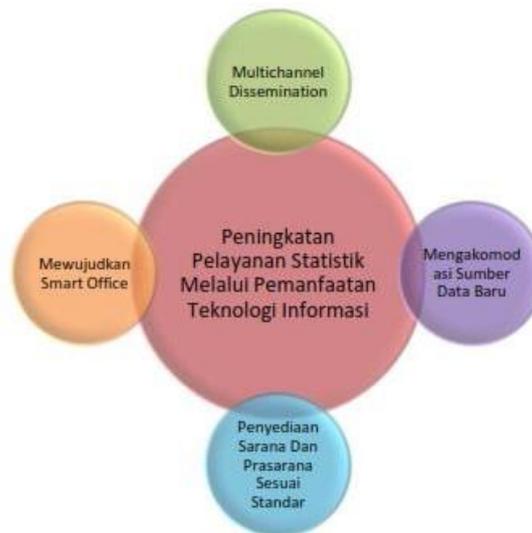
Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi strategic enabler dan decision support system (DSS).

3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru; meningkatnya layanan statistik melalui multichannel dissemination; meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan Smart Office.



Gambar Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik

Interlink antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya remapping dan reengineering infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-2024. Cross interchange antara needs dan wants adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai tools/enabler. Namun seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya tool dan enabler dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan style bagi modern office.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infratraktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, "IT for Function and Solution as empowering achievement". Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020-2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (wants), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (needs). Maka penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah Better, Faster, and Cheaper saat ini haruslah menyentuh pada reliable and accountable.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari Role Model untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi "role and rule in system and infrastructure". Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai keypoint successor. Perubahan sistem dan infrasturktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak miss track. Maka perlu adanya

konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :

- a) Meningkatkan akurasi data, melalui :
 - i. Integrasi proses bisnis; serta
 - ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
- b) Memastikan kemutakhiran data dengan :
 - i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - iii. Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
- f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia

2. Meningkatkan Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

3. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
- b) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Penerapan pengembangan SDM berdasar Human Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu dan dinamis
 - ii. Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA)
 - iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
- c) Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu
 - i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
 - ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit System)
 - vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family
 - vii. Talent pool untuk suksesi organisasi
- d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
 - ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)
 - ii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
 - iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k) Pewujudan Smart Office di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Merumuskan grand design smart office
 - ii. Implementasi smart office di BPS

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil Trilateral Meeting Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

 - a) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
 - b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;

- c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan generik, yaitu:

- i. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
 - ii. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
 - iii. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
 - iv. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
 - v. Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
 - vi. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
 - vii. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
 - viii. Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
 - ix. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
 - x. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
 - xi. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- i. Pengembangan dan Analisis Statistik;
- ii. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- iii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- iv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- v. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- vi. Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- vii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- viii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- ix. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- x. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- xii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;

- xiii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- xiv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- xv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

3.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

- a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hukum dan tatakelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan goal 17 menurut Perpres no 59 tahun 2017, posisi BPS sama dengan k/l lain yaitu instansi penyedia data sedangkan BPS secara umum ada tugas sebagai pembina statistik, jika peran itu dijalankan maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

- b) Gender
Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:
 - i. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik
 - ii. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan
 - iii. memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS

- iv. menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.

c) Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada Framework for Cultural Statistics (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu juga untuk mewujudkan agenda Sustainable Development Goals SDGs (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik tangible (benda) maupun intangible (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa di antaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

d) Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (value) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka

Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pemantapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti big data, mobile computing, artificial intelligence, dan Internet of Things, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

- 3.2.5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19 CORONA VIRUS DISEASE 2019 atau disingkat COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka presiden menetapkan Kepres 12/2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. ditindaklanjuti dengan pemerintah menerbitkan Keppres 7/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, yang diperbarui dengan Keppres 9/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Inpres 4/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran KL, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlu dilakukan suatu tindakan perubahan pola bekerja, belajar dan beribadah serta penerapan social distancing dan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan refocusing anggaran berdasarkan Perpres 54/2020 tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan

sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar.
Langkah BPS di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020. Membatalkan metode wawancara yang dilakukan petugas diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/ telepon.
3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara online.
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara online dari rumah.

3.2.6. Arah dan Strategi BPS Provinsi Sulawesi Utara

Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)
Peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar	Meningkatnya akurasi data, melalui integrasi proses bisnis, serta penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas
Terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI)	Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
Pengembangan infrastruktur statistik nasional untuk mendukung SSN	Penguatan Infrastruktur BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional	Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
Penyediaan Statistik Sektoral	Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
Meningkatkan kapasitas SDM BPS	Pelatihan dan pembinaan secara langsung maupun daring

Penguatan Kompetensi Pegawai BPS	Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik	Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional	Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai	Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja	Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran
Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja	Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal
Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien	Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan
Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan

3.3 Program dan Kegiatan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan maka BPS Provinsi Sulawesi Utara menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Tabel-3-1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional 2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional 4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah	T1.Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	IKT1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	a) Peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar	Meningkatnya akurasi data, melalui integrasi proses bisnis, serta penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas	1) Program Dukungan Manajemen 2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	
		SS1.Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	IKSS1.1 Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional		Memastikan kemutakhiran data dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data; penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.		- Pengembangan dan Analisis Statistik; - Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi; - Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; - Pengembangan Sistem Informasi Statistik; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;	
								Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistic
								Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional
								Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
								Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral								

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia		- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
		T2.Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	IKT2. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	a) Terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia	Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional		
		SS2.Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	IKSS2.1 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistic		Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral		
	IKSS2.2 Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar			Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK	
		T3.Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	IKT3. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	a) Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN	Menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN)		
		SS3.Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	IKSS3.1 Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	b)Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional	Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN		
	Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN						

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				c) Penyediaan statistik sektoral	Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik		
		T4.Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	IKT4. Hasil SAKIP oleh Inspektorat	a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS	Pelatihan dan pembinaan secara langsung maupun daring		
		SS4.SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	IKSS4.1 Hasil SAKIP oleh Inspektorat	b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS	Penerapan pengembangan SDM berdasar Human Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu dan dinamis		
					Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA)		
					Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai		
			IKSS4.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	c) Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik	Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai		
					Menyempurnakan peraturan kepegawaian		
					Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM		

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian		
					Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit System)		
					Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family		
					Talent pool untuk suksesi organisasi		
				d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional	Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional		
					Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional		
				e) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai	Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)		
					Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku		
				f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja	Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran		
				g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan	Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka		

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				akuntabilitas kinerja	meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal		
				h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien	Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan		
					Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran		
				i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima		
					Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai		
				j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar.	Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan		
					Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan		
					Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem		
				k) Pewujudan Smart Office di BPS	Merumuskan grand design smart office		

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Implementasi smart office di BPS		

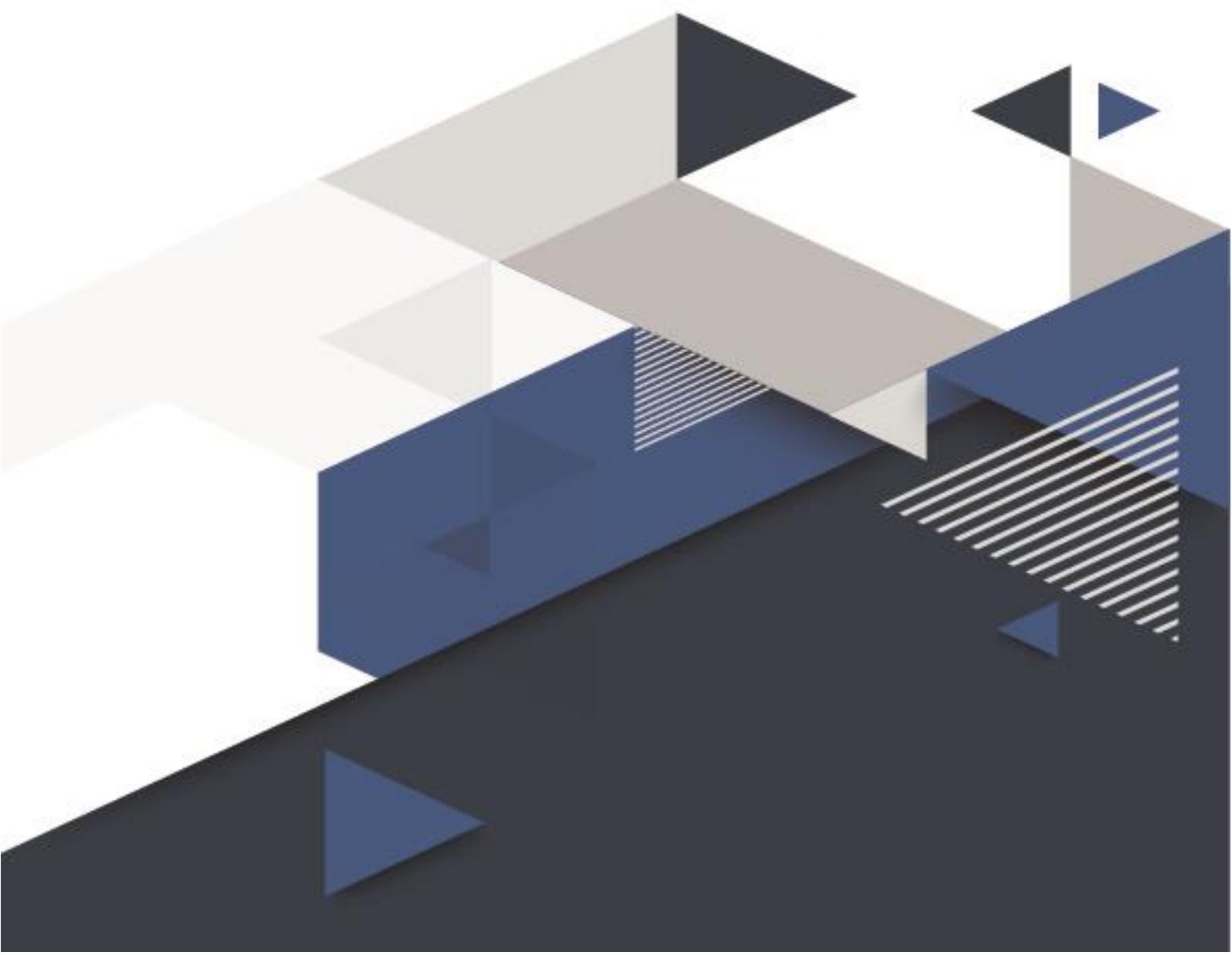
<https://sulut.bps.go.id>

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan



4.1 Target Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020 – 2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 – 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 – 2024, BPS menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (outcome) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja

BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 - 2024

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	28	96	96	97	97	IPDS
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	0	6,89	13,79	20,69	20,69	Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, Nerwilis
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	100	100	100	100	100	IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata	50	75	75	75	75	IPDS

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
		sektoral dan khusus sesuai standar (%)						
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	25	50	50	50	50	Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, IPDS, dan Nerwilis
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Penilaian SAKIP	74	74	75	75	75	Tata Usaha
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	98	99	99	99	99	Tata Usaha

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, BPS memiliki sasaran program dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan
- Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
- Progress pengembangan jabatan fungsional baru

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- Hasil penilaian SAKIP oleh BPS RI dan Kemenpan RB
- Hasil penilaian RB oleh BPS RI dan Kemenpan RB

Sasaran Program (Outcome):

Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Sasaran Program (Outcome):

Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Sasaran Program (Outcome):

Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar
- b) Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik

4.2 Kerangka Pendanaan

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Dokumen Renstra BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Tahun 2020 - 2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	12.933,70	14.158,40	15.382,6	14.734,90	15.331,80
Kegiatan 2886 Bagian Tata Usaha	12.933,70	14.158,40	15.382,6	14.734,90	15.331,80
054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	9.239,64	6.727,43	10.393,55	29.939,03	16.329,92
Kegiatan 2896 Bid IPDS	27,10	29,46	31,56	33,68	35,83
Kegiatan 2897 Bid IPDS	162,50	168,90	174,77	180,88	187,22
Kegiatan 2898 Bid Nerwilis	156,82	167,04	180,44	194,07	207,96
Kegiatan 2899 Bid Nerwilis	804,52	839,39	283,68	295,63	307,82
Kegiatan 2900 Bid IPDS	70,83	76,29	79,83	83,46	87,18
Kegiatan 2902 Bid Distribusi	193,76	219,83	226,59	233,58	240,81
Kegiatan 2903 Bid Distribusi	449,59	465,32	3.711,19	632,06	426,59
Kegiatan 2904 Bid Produksi	170,11	195,93	212,18	228,48	244,86
Kegiatan 2905 Bid Sosial	4.754,16	1.904,38	781,43	863,40	975,27
Kegiatan 2906 Bid Sosial	1.737,47	1.871,94	2.378,28	2.023,05	2.108,84
Kegiatan 2907 Bid Sosial	68,19	137,81	278,21	92,77	162,10
Kegiatan 2908 Bid Distribusi	351,16	322,18	410,24	438,55	467,21

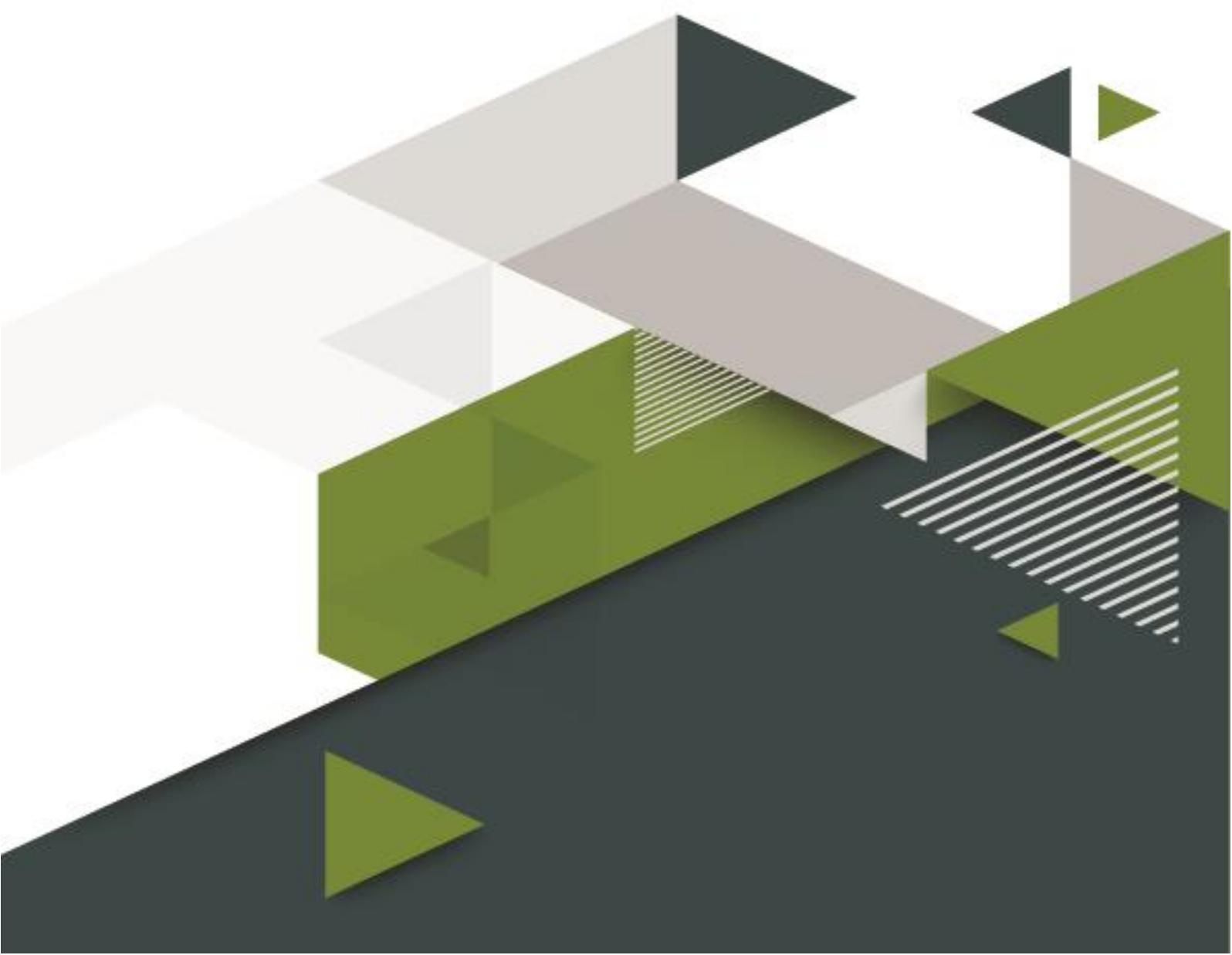
Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan 2909 Bid Produksi	31,03	32,12	33,24	34,40	35,61
Kegiatan 2910 Bid Produksi	262,42	296,84	1.611,91	24.605,02	10.842,62

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam tabel diatas.

<https://sulut.bps.go.id>

BAB 5

Penutup



Renstra BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Renstra BPS Provinsi Sulawesi Utara periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

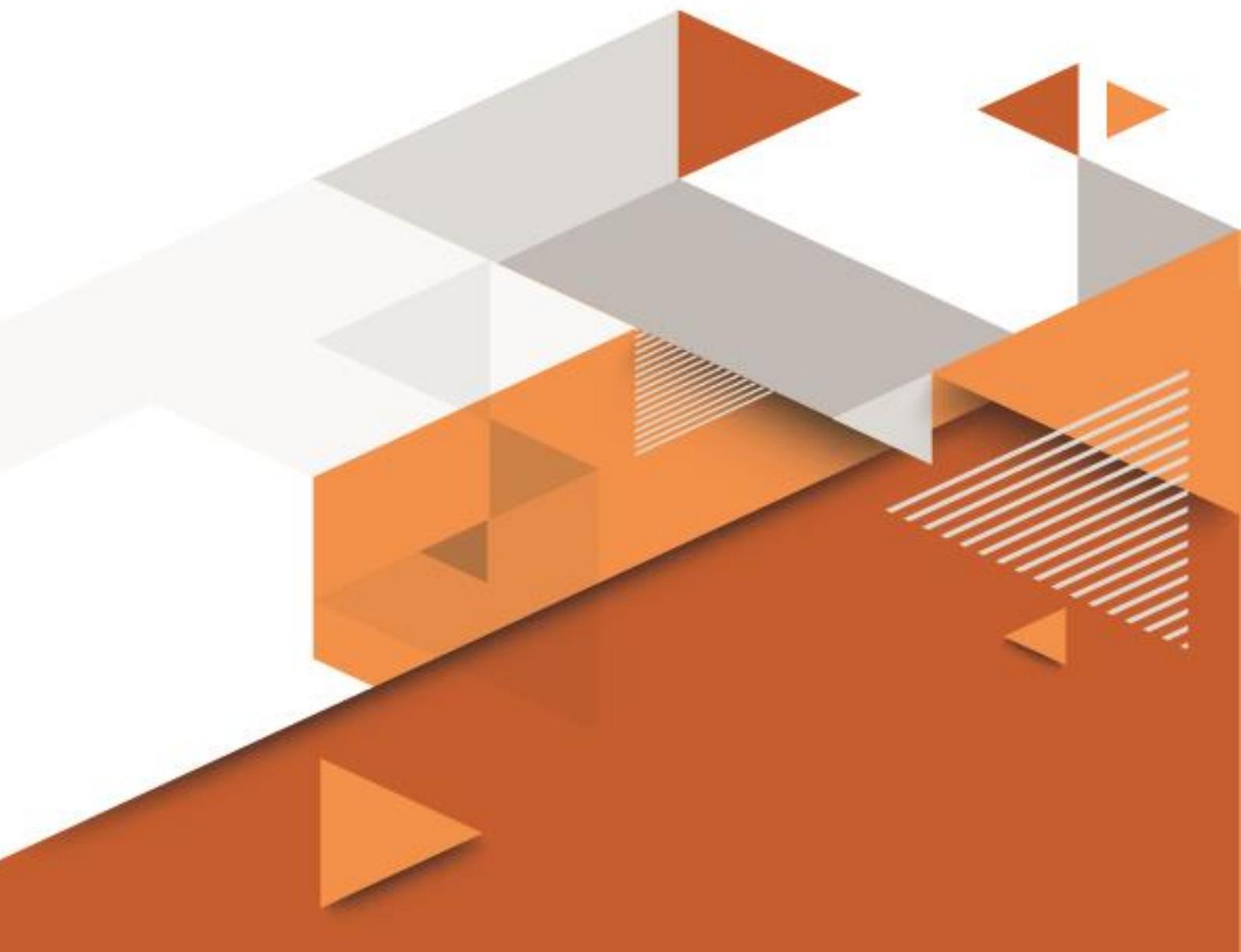
Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2020 – 2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesionalisme, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2020 – 2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN



Matrik Kinerja dan Pendanaan BPS Provinsi Sulawesi Utara

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik												
	SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas											IPDS
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	28	96	96	97	97						
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	0	6,89	13,79	20,69	20,69						
	SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN											IPDS
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	50	75	75	75	75						
	SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I											IPDS
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	25	50	50	50	50						
	SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan											TATA USAHA
	Penilaian SAKIP	74	74	75	75	75						
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	98	99	99	99	99						

KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)							12.933,70	14.158,40	15,382,6	14.734,90	15.331,80	Tata Usaha
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS									1.770,00		500,00	
	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	0	0	18	0	7			1.050,00		375,00	
	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	0	0	0	0	9					125,00	
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	0	0	9	0	0			135,00			
	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0	0	585	0	0			585,00			
	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0	0	0	0	0						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam							425,60	443,30	458,80	474,90	491,50	
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Yang Tepat Waktu	42	42	42	42	42						
Layanan Perkantoran							12.508,10	12.379,50	12.963,40	13.575,30	14.216,50	
	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx (%)	100	100	100	100	100						
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx (%)	96	97	97	98	98						

KEGIATAN 2897: Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik)						162,50	168,90	174,77	180,88	187,22	IPDS
	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN					108,36	112,20	116,08	120,14	124,35	
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	10	12	15	18	20					
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	10	12	15	18	20					
	Jumlah instansi/institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	1	1	2	3	4					
	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	1	1	2	3	4					
	Jumlah sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	1	2	3	4	5					
	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan					54,14	56,70	58,69	60,74	62,87	
	Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen	200	220	250	270	300					
	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS (%)	96	96	96	96	96					
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	30.000	32.000	35.000	37.000	40.000					
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk	1	1	2	3	4					
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	1	1	2	3	4					
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58					
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas data	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58					

KEGIATAN 2909: Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan)							31,03	32,12	33,24	34,40	35,61	Produksi
	Tersedianya Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Yang Berkualitas	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	31,03	32,12	33,24	34,40	35,61	
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	92	92	93	94	95						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	90	91	92	95	95						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;											
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik											

<https://surl.bps.go.id>

KEGIATAN 2910: Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan)							262,42	296,84	1.611,91	24.605,02	10.842,62	Produksi
	Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Yang Berkualitas	4	4	4	4	4	262,42	296,84	1.611,91	24.605,02	10.842,62	
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu	4	4	4	4	4						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	99	99	99	99	99						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	90	90	90	95	95						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	91	92	93	94	95						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;											
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik											

<https://surl.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan 17 Agustus, Manado, Sulawesi Utara

Email : bps7100@bps.go.id

Website : sulut.bps.go.id